

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Tahun :

2	0	2	2
---	---	---	---



Subbagian Humas dan TU Kalan

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan tengah

Media :	Radar Sampit <input checked="" type="checkbox"/>	Halaman : 08
Kompas	Kalteng Pos	Borneo News
Palangka Post	Tabengan	

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

# Rp 80 Miliar untuk

# Perbaiki Jalur Selatan

**SAMPIT**-Perbaikan ruas jalan jalur selatan Kotawaringin Timur (Kotim) yakni Sampit -Samuda Kecamatan Mentaya Hilir Selatan hingga Pantai Ujung Pandaran Kecamatan Teluk Sampit, segera dilakukan. Proyek itu saat ini masih dalam proses lelang di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng).

"Kami sudah komunikasi dengan Kadis PU Provinsi, saat ini masih proses lelang, mudah-mudahan kemungkinan bulan Juni baru dikerjakan. Biasanya lelang dulu baru penandatanganan kontrak lalu dikerjakan," ujar Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Halikinnor.

Dirinya bersyukur Kotim mendapatkan proyek multiyears, yang anggarannya digunakan untuk

meningkatkan pembangunan di wilayah ini. Salah satunya peningkatan infrastruktur jalan. Sementara itu, pihak provinsi menggelontorkan anggaran puluhan miliar untuk perbaikan di ruas jalan yang menjadi wewenang mereka.

"Alhamdulillah kita dapat proyek multiyears, jadi anggaran yang dialokasikan oleh provinsi Rp 40 miliar dari Sampit ke Samuda dan Rp 40 miliar dari Samuda ke Ujung Pandaran," terangnya.

Menurut Halikinnor jalan ke Samuda mutlak merupakan tanggung jawab provinsi sehingga pihaknya tidak dapat melakukan perbaikan meskipun sifatnya sementara. Namun kondisi jalan tersebut sudah dilaporkan Pemkab Kotim ke provinsi.

"Sudah kami laporkan jadi kita tunggu saja, tapi kalau masuk jalan dalam kota walaupun itu jalan provinsi tetap kita perbaiki. Tapi yang jalan ke Samuda karena mutlak tanggung jawab provinsi, kita mau memperbaiki juga harus lapor," terangnya.

Ditambahkannya, perbaikan jalan tersebut jangan sampai di satu titik itu ada dua anggaran, karena akan jadi permasalahan hukum nantinya. "Jadi kita melaporkan ke provinsi dan provinsi pun memantau terus makanya itu sudah diprogramkan, kami berharap sementara bisa ditangani. Kalau kita yang menangani kita pasti koordinasi juga dengan provinsi," tutup Halikin. (yn/gus)